

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK MISKIN, ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
DANA DESA (DD) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PENDIDIKAN
(Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017)**

Nuri Amiyati¹

Andy Dwi Bayu Bawono²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta²

[nuriami688@gmail.com¹](mailto:nuriami688@gmail.com)

Abstract

This research aims to examine the influence of the Number People Living in Poverty, Village Fund Allocation (ADD) and Village funds (DD) on the village expenditures in education in 2017. The research uses population from all village in Wonogiri district and purposive as a sampling method. The hypothesis was tested by using multiple regression analysis with the coefficient of determination, F-tests and t-tests. The result shows that the Number of People Living in Poverty has a negatively influence to the allocation of Education Expenditure. Further, the variables of Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds (DD) have no significant influence on allocation of Education Expenditure.

Keywords: *Number of People Living in Poverty, ADD, DD and allocation of Education Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah Negara sangat ditentukan oleh desa, karena Negara yang maju harus memiliki provinsi yang maju, provinsi yang maju harus memiliki kabupaten dan kota yang maju, serta kabupaten dan kota yang maju harus memiliki desa dan kelurahan yang maju. Disimpulkan bahwa basis kemajuan dari sebuah Negara ditentukan oleh desa yang maju, hal ini sesuai dengan perubahan kedudukan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa seharusnya dapat dijadikan sebagai basis desentralisasi dan sanggup menjalankan perannya sebagai *self governing community*, namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh desa. *Pertama:* Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang kecil pula. *Kedua:* Tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang terbelah rendah mengakibatkan Desa sulit dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. *Ketiga:* Rendahnya dana operasional yang dimiliki Desa untuk melaksanakan pelayanan. *Keempat:* Terdapat banyak program pembangunan dalam desa, tetapi semuanya dikelola oleh DINAS. Program seperti itu menimbulkan masalah, yaitu seperti program tidak memberikan kesempatan bagi desa untuk belajar, dan program tersebut bersifat *top down* sehingga tidak sesuai dengan apa yang desa dan masyarakat butuhkan.

Masalah yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah terkait dengan masalah tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pembangunan manusia. Penyebab dari masalah tersebut adalah dukungan sumber pendanaan yang dibatasi. Pembatasan sumber dana tersebut mengakibatkan rendahnya pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan sektor publik. Tingkat investasi publik yang rendah di Provinsi Jawa Tengah dapat terlihat dari rendahnya alokasi yang dikeluarkan pemerintah pada sektor tersebut.

Kemiskinan adalah salah satu masalah pemerintah yang cukup sulit untuk diatasi. Krisis ekonomi yaitu keadaan dimana seseorang terpaksa untuk hidup dengan kekurangan, dan gaya hidup yang tinggi yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Hal ini dipengaruhi dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Pemerintah seharusnya fokus pada sektor pendidikan, sehubungan dengan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan penduduk agar memperoleh kehidupan yang layak. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Produktivitas penduduk akan meningkat apabila alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik juga ditingkatkan dan peningkatan produktivitas penduduk tersebut, dapat meningkatkan pembangunan manusia yang kemudian akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan merupakan salah satu tujuan dasar dari pembangunan di suatu wilayah. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Dengan demikian produktivitas dan kualitas penduduk akan meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa yaitu sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana DD langsung turun ke desa tidak melalui orang ketiga. Alokasi DD sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berdeda. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dikemudian hari dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian DD didasari dengan jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan letak geografis. Dana Desa Pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk pelayanan dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan (Luvitasari, 2018).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa, selain itu sumber pendapatan desa yang lain adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (Sari & Abdullah, 2017).

Desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD dialokasikan sebesar 30% untuk pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. ADD nantinya diharapkan dapat membantu desa untuk memiliki peluang dalam meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan (Luvitasari, 2018). Bidang pendidikan termasuk dalam salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan desa. Dimana desa mempunyai peran penting dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Sehubungan dengan dilaksanakannya UU Desa, sampai saat ini belum ada artikel yang meneliti tentang pengaruh dari Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap belanja pendidikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membuat penelitian berjudul "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa

(DD) Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017)”

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya sebagai acuan terkait Belanja Pendidikan dimana yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menambah Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel independen.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Kemiskinan

Sar A. Levitan (1992) mendefinisi kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek non-material. Seperti yang disimpulkan oleh Wolf Scott sebagai berikut : *pertama*, kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk yang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan didefinisikan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. *Kedua*, kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit, dan lain-lain. *Ketiga*, kemiskinan memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas tangga, dan kehidupan yang layak (Ala, 1996:33).

Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Penduduk Miskin

Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk indonesia terus mengecil akibat dari terus menurunnya jumlah penduduk miskin. Lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin dapat mengindikasikan tiga hal yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum dapat dikatakan berkualitas karena tidak mewujudkan pemerataan kesejahteraan atau (2) pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga secara komparatif tidak memberikan taraf hidup yang bermakna dan atau (3) pertumbuhan ekonomi tidak dihasilkan oleh sektor padat karya sehingga pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati secara langsung oleh sebagian besar masyarakat.

Kemiskinan makro dan kemiskinan Mikro

Secara konsep, kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Pengukuran kemiskinan makro menyediakan data tentang jumlah penduduk miskin secara agregat (nasional) yang dihitung dari hasil estimasi atau perkiraan sampel data susenas. Sementara kemiskinan mikro didasarkan 14 kriteria kemiskinan dengan berbasis pada rumah tangga. Ke-14

varaibel yang digunakan adalah luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga (Dimensi Kemiskinan, 2009:48).

Secara umum kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian masyarakat tidak bisa menggunakan sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap berada digaris kemiskinan. Itulah sebabnya banyak pakar ekonomi yang sering mengkritik pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya terfokus pada pencapaian pertumbuhan daripada pemerataan desa (Dimensi Kemiskinan, 2009:55).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan ADD adalah mempercepat pembangunan di tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumberdaya manusiannya. Pembangunan ADD sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa pada pos-pos anggaran yang menyangkut honorarium desa seperti : honorarium kepala desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretariat desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun serta honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pemberdayaan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan dan eksehatan, pemberdayaan masyarakat dan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat di desa (Siti,2016). Sehingga dengan adanya bantuan ADD dapat mendukung pemberdayaan masyarakat di desa dengan melibatkan partisipasi yang aktif di masyarakat.

Dana Desa (DD)

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Belanja Desa

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
Belanja bidang ini meliputi beberapa jenis, yaitu :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan
 - 2) Operasional perkantoran
- b. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Belanja ini digunakan untuk pembangunan desa, misalnya perbaikan irigasi , pengaspalan jalan, dll.

c. Belanja bidang pembinaan masyarakat .

Belanja ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, dan pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna.

d. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat.

Belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri, dll.

e. Belanja bidang tak terduga

Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana alam.

Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Luvitasari, 2018).

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu perhatian dalam pelayanan dasar di desa. Kewenangan desa dalam sektor pendidikan terbatas pada pengelolaan PAUD, pemberian beasiswa anak-anak tidak mampu, pemberantasan buta huruf, dan lebih khusus lagi gerakan membangun sadar pendidikan (Sutoro Eko, 2014:203-204).

Seperti yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Luvitasari, 2018).

Menurut Permendes No. 4 2016 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2017. Secara prioritas penggunaan DD ditunjukkan pada dua bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa terdapat beberapa bidang yang bisa meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan dalam bidang pendidikan. Penggunaan DD dan ADD secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penuntasan kemiskinan, pemberdayaan serta peningkatan pelayanan (kesehatan, pendidikan, dan kewargaan).

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Belanja pendidikan

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menjadi penghambat pendidikan karena semakin tinggi jumlah penduduk yang mengenal huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dapat mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

Pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui

pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008). Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi dibidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

H₁ : Jumlah penduduk Miskin berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja pendidikan

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa.

Dalam penelitian sebelumnya Ummu Habibah (2017) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pendidikan.

H₂ : Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan.

Pengaruh Dana desa (DD) terhadap Belanja Pendidikan

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik Desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Dalam bidang pendidikan dana desa telah berhasil membangun 14.957 PAUD (Buku Pintar Dana Desa, 2017:18).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mardiana Luvitasari menyatakan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan.

H₃ : Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan

3 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan kuantitatif dimana data diperoleh dari angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap Belanja Pendidikan.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 298 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang penentuannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri yang mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 dan (2) Desa-Desa yang melakukan pengeluaran dibidang pendidikan.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara langsung dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk Miskin

di Desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri dan APBDes Wonogiri tahun 2017 yaitu Belanja pendidikan, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Belanja Pendidikan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja desa bidang pendidikan. Dalam upaya menunjang pelayanan dasar khususnya pendidikan Desa juga memberikan peran aktif melalui alokasi anggaran bidang pendidikan pada APBDes nya, khususnya untuk menunjang program pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 yang telah disahkan pada akhir 2015 tentang prioritas DD tahun 2016. Secara umum prioritas penggunaan DD ditunjukkan pada dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan dalam bidang pendidikan. Dimana desa mempunyai peran dalam mendukung pendidikan di Wonogiri.

2. Variabel Independen

Jumlah Penduduk Miskin

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk Miskin. Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsistensi. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Dana Desa (DD)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Habibah, 2017).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa (Habibah, 2017).

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yaitu untuk menguji besarnya pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan (Ghozali, 2011:96). Uji regresi linear berganda digunakan untuk melihat hubungan Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Belanja Pendidikan. Berikut adalah model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$BP = a + \beta_1 JPM + \beta_2 ADD + \beta_3 DD + e$$

Keterangan :

BP = Belanja Pendidikan

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing X

JPM = Jumlah Penduduk Miskin

ADD = Alokasi Dana Desa

DD = Dana Desa

e = Koefisien error

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji dan mengetahui kelayakan atas model dengan memenuhi asumsi normalitas data bebas dari asumsi statistik baik itu multikoleniaritas dan heteroskedastisitas (Sujarweni, 2015:181). Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan adalah model *Central Limit Theorem* (CLT). *Central Limit Theorem* adalah sebuah teorema yang menyatakan apabila sampel yang diuji (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti distribusi normal. Sehingga berdasarkan sampel penelitian sebesar 176, maka sampel tersebut dianggap memiliki distribusi normal karena jumlahnya melebihi 30 sampel (Lind, 2014:300-301).

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
JPM	0,753	1,328	Tidak terjadi multikolinearitas
ADD	0,968	1,033	Tidak terjadi multikolinearitas
DD	0,746	1,34	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Hasil Uji multikolinearitas nilai *Tolerance* untuk semua variabel independen dalam model regresi lebih dari 0,1 (10%) nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10%. Sehingga dapat disimpulkan untuk variabel Jumlah Penduduk Miskin, ADD dan DD dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan (Ghozali, 2011:105-106).

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas setiap variabel bebas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak ada gangguan heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga memenuhi persyaratan untuk analisis regresi (Ghozali, 2011:139-143).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk melihat keakuratan hubungan Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Belanja Pendidikan.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	58911432	81266770		0,725	0,47
JPM	-24458,3	10345,98	-0,204	-2,364	0,019
ADD	0,007	0,035	0,016	0,212	0,833
DD	-0,04	0,106	-0,033	-0,383	0,702

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BP = 58911432 + -24458,293 \text{ JPM} + ,007 \text{ ADD} + -,040 \text{ DD} + e$$

Interpretasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Nilai Konstanta (α) = 58911432

Nilai konstanta (α) = 58911432. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) nilainya sama dengan 0, maka besarnya variabel Belanja Pendidikan nilainya adalah Rp.58.911.432. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (β_1) = -24458,3

Nilai koefisien regresi untuk variabel Jumlah Penduduk Miskin adalah sebesar -24458,3. Hal ini menunjukkan bahwa apabila independen lain nilainya tetap dan Jumlah Penduduk Miskin mengalami kenaikan 1%, maka Belanja Pendidikan akan mengalami penurunan sebesar Rp.-24458,3.

Variabel Alokasi Dana Desa (β_2) = 0,007

Nilai koefisien regresi untuk variabel Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 0,007. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan 1%, maka Belanja Pendidikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,007.

Variabel Dana Desa (β_3) = -0,04

Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Desa (DD) adalah sebesar -0,04. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan Dana Desa mengalami kenaikan 1%, maka Belanja pendidikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp. -0,04.

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Kesimpulan Hopitesis
JPM	-2,364	1,97393	0,019	H ₁ Diterima
ADD	0,212	1,97393	0,833	H ₂ Ditolak
DD	-0,383	1,97393	0,702	H ₃ Ditolak

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji t Jumlah Penduduk Miskin diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,364 yang nilainya lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,97393 dengan nilai probabilitas sebesar $0,019 < 0,05$ berarti H_0 diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima kebenarannya, artinya maka Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pendidikan.

Berdasarkan hasil uji t Alokasi Dana Desa penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $0,212 < t_{tabel}$ sebesar 1,97393 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 kurang dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Hal ini berarti bahwa H_2 Ditolak. Dengan hasil ini, maka Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pendidikan.

Berdasarkan hasil uji t Dana Desa penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $-0,383 < t_{tabel}$ sebesar 1,97393 dengan nilai signifikansi sebesar 0,702 kurang dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Hal ini berarti bahwa H_3 Ditolak. Dengan hasil ini, maka Dana Desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pendidikan.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Fhitung	Signifikansi	Nilai Sig.	Keterangan
Regressien	2,888	0,037	0,05	Berpengaruh Simultan

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Hasil uji F diperoleh F_{hitung} 2,888 lebih besar dari F_{tabel} 2,27 dan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah *fit*. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa dan dana Desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pendidikan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5
Hasil Uji determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,221 ^a	0,049	0,032	28764889,9

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dengan adjusted-R pada tabel diatas diperoleh angka 0,032 atau 32%. Hal ini menunjukkan bahwa 32% variasi variabel Belanja pendidikan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa sedangkan sisanya yaitu 68% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif terhadap Belanja Pendidikan, hal ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $-2,364 < 1,97393$, sehingga hipotesis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan diterima.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan, yang dapat berarti bahwa semakin banyak Jumlah Penduduk Miskin maka semakin sedikit pengalokasian Belanja Pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa alokasi Belanja Pendidikan untuk desa masih diterima oleh orang-orang yang kaya dibanding orang-orang yang miskin, sehingga masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan akan tetap pada posisinya karena haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak tercapai. Hal ini membuktikan bahwa Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Pendidikan

Dari uji t ADD diketahui sebesar $0,833 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $0,212$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar $1,97393$. Hal ini berarti menunjukkan ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Tujuan utama ADD adalah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumberdaya manusianya. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Saat ini, dikarenakan penerapan awal UU Desa, pemerintah desa lebih terfokus untuk mengalokasikan dananya untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana dikarenakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan fisik desa yang sebelumnya belum banyak difikirkan oleh pemerintah daerah, sehingga alokasi untuk belanja desa bidang pendidikan belum teralokasikan dengan baik.

Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Pendidikan

Berdasarkan hasil uji t Dana Desa penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $-0,383 < t_{tabel}$ sebesar $1,97393$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,702$ kurang dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Hal ini berarti bahwa H_3 Ditolak. Dengan hasil ini, maka Dana Desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pendidikan.

Pemerintah pusat memberikan DD secara umum prioritas penggunaan DD ditunjukan pada dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam era sekarang ini, sebagian besar pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur khususnya jalan, irigasi dan jembatan. Sehingga dimungkinkan aliran DD tersebut belum banyak digunakan untuk alokasi bidang pendidikan. Alokasi belanja desa bidang pendidikan di Wonogiri lebih banyak diambil dari PADesa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luvitasari Mardiana (2018) dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR), Dan Jumlah Murid Paud Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017".

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pendidikan Miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan. Sedangkan untuk variabel Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan.

Saran

Untuk menambah pendapatan desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan desa dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, agar tercipta desa yang mapan dan mandiri. Dalam penelitian ini masih diperlukan pengembangan dan perbaikan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian-penelitian yang akan datang. Berikut saran yang dapat disampaikan peneliti, (1) diharapkan kepada seluruh desa di kabupaten Wonogiri untuk terus *update* dalam melaporkan laporan keuangannya agar hasil penelitian lengkap serta mencerminkan kondisi keseluruhan

keuangan Kabupaten Wonogiri. (2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode waktu pengamatan memberikan gambaran secara luas tentang perkembangan yang dapat mempengaruhi Belanja Pendidikan di desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri. Misalnya dengan membandingkan antara tahun 2016 dan 2017 sehingga hasilnya dapat diperbandingkan. (3) Perlu memperluas tempat penelitian tidak hanya mengambil sampel dari Kabupaten Wonogiri saja namun bisa melakukan penelitian dikabupaten lain seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dll;

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ala,1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan.Liberty, Yograkarta.*
- Chomariyah dkk, 2015. Pengelolaan Keuangan Di Desa Pesisir Berdasarkan Asas Partisipasi Dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Upaya Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Gresik. *Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 1 Mei 2015 : 111-128.*
- Gani dan Kristanto, 2013. Pengaruh dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal InFestasi, Vol.9 No.2 Desember 2013. Hal.115-122.*
- Habibah, Ummu, and Andy Dwi Bayu Bawono (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo).* Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Hardiana, Dei Gratia Ulfah. *Implementasi permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa: Studi pada Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Hariato, David, and Priyo Hari Adi. "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita." *Simposium Nasional Akuntansi X(2007): 26-28.*
- Haryanto, 2005. Analisa Data Alokasi Umum (Dau) Kaitannya Dengan Penciptaan Kemandirian Daerah Di Era Otonomi. *Simposium Riset Ekonomi II, Surabaya, 23-24 November 2005.*
- Indriati, Neneng Erlina. "Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan)." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 6.2 (2014).*
- Janah, Ayu Miftakhul, and Andy Dwi Bayu Bawono. *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (Padesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri).* Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Kurniawati, Fransisca Roosiana. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia.* Diss. Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Kurnianingsih Titik, Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR RI.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018. *Buku Pintar Dana Desa*.

Larasati, Dewi Citra, and Muhammad Okto Adhitama. "MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DANA DESA (DD) SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur)." *REFORMASI* 7.2 (2018).

Luvitasari, Mardiana, and Atwal Arifin. *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Murid PAUD Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Muchlis, Mustakim, and Ahmad Dzauki Abdur Rabb. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93 TAHUN 2015 PADA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 2.2 (2016).

PP No.47 Tahun 2015 tentang Desa.

Prakosa, Kesit Bambang. "Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY)." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8.2 (2004). ISSN: 1410 – 2420.

Sari, Intan Mala, and Muhammad Faisal Abdullah. "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15.1 (2017): 34-49.

Siregar, Hermanto, and Dwi Wahyuniarti. "Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin." *Departemen Pertanian. Jakarta* (2008).

Subroto, Agus. *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2009.

Undang-Undang N0.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widodo, Adi, Waridin Waridin, and Johanna Maria Kodoatie. "Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi jawa tengah." *Jurnal Dinamika ekonomi pembangunan* 1.1 (2012): 25-42.